



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
UNIT KERJA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPRIADI
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 169020

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

2.011.168.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m²/80 m² di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 370.224.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m²/60 m² di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 330.944.000
3. Tanah Seluas 518 m² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 200 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. Tanah Seluas 300 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
6. Tanah Seluas 500 m² di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m²/117 m² di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m²/15 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

35.100.000

1. MOTOR, HONDA KARISMA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 100.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000



3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	12.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	73.647.093
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.132.515.093
III. HUTANG	Rp.	494.155.879
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.638.359.214

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.